



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 500/Kep.975-BagEk/2024

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengujian Indeks Kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor PE.04.03-783/PW10/5.2/2023 tanggal 22 Desember 2023, hasil Indikator Roadmap Strategi P3DN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, skor indeks kepatuhannya belum memenuhi capaian skor indeks yang seharusnya;
- c. bahwa Peta Jalan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Bandung Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 500/Kep.1905-BagEk/2023, namun untuk memberikan panduan dalam mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja perlu disusun rencana aksi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Bandung Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri;

2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor PE.04.03-783/PW10/5.2/2003 tanggal 22 Desember 2023 Hal Laporan Hasil Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan P3DN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Periode Semester 2 Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Bandung Tahun 2024.
- KEDUA : Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya disebut Rencana Aksi P3DN Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Rencana Aksi P3DN Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, merupakan panduan bagi setiap Anggota Tim P3DN Kota Bandung dan seluruh Perangkat Daerah, RSUD, RSKGM serta BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam Pelaksanaan Program P3DN periode Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pencapaian target Rencana Aksi P3DN Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dilaporkan oleh setiap Perangkat Daerah, RSUD, RSKGM dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung setiap triwulan kepada Wali Kota Bandung melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Sekretariat Tim P3DN Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juli 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 500/Kep.975-BagEk/2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 KOTA BANDUNG TAHUN 2024

RENCANA AKSI PROGRAM P3DN TAHUN 2024

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Tar-get	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (P3DN)	Realisasi transaksi P3DN	Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Baik	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	1. SDM Tata Kelola Pengadaan yang Belum Kompeten	Meningkatnya Pelaku PBJ yang Kompeten	Jumlah SDM Pelaku PBJ yang Tersertifikasi	N/A	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan kepada Pelaku PBJ	Orang	Jumlah SDM Pelaku PBJ di yang Dilatih	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung (BKPSDM)
									Melakukan Sertifikasi kepada Pelaku PBJ yang Sudah Diberikan Pelatihan	Orang	Jumlah SDM Pelaku PBJ yang Lulus Uji Kompetensi	BKPSDM
									Melakukan Monev Terhadap Lulusan Sertifikasi untuk Memantau Kualitas SDM Dapat Terjaga	Dokumen	Laporan kegiatan monev SDM Pelaku PBJ dan SDM Disdagin Bersertifikasi yang Masih Eligible	BKPSDM
					2.Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang Belum Optimal dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan	Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan	Tingkat Kepatuhan Pencatanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE dan P3DN SIPD	N/A	Mengumumkan Seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai pagu Pengadaan pada SiRUP	Persen	Persentase Paket Pekerjaan yang diumumkan RUPnya melalai SiRUP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung (BPBJ)

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Tar-get	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
					Jasa	Jasa			Melaksanakan bimbingan teknis Penggunaan Sistem pada aplikasi P3DN SIPD	Kegiatan	Jumlah laporan kegiatan	BPBJ
									Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi realisasi PDN	Laporan	Persentase realisasi TKDN/PDN	BPBJ
									Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket e-Tendering pada SPSE dibandingkan dengan nilai RUP e-Tendering pagu RUP e-Tendering	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e-Tendering	BPBJ
									Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam menyelesaikan Paket e- Purchasing pada Katalog Elektronik dibandingkan paket aktif untuk e purchasing	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring Kepatuhan PD dalam Menyelesaikan Paket e- Purchasing pada Katalog Elektronik sampai dengan tahap selesai	BPBJ
									Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung) pada SPSE dibandingkan dengan Nilai RUP	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung) pada SPSE dibandingkan Nilai RUP	BPBJ

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Tar-get	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha PDN/UMKM dalam proses pengadaan (Supply PDN)	Presentase peningkatan pelaku usaha yang terdaftar di katalog lokal	N/A	1.Proses sertifikasi yang sulit	Terwujudnya iklim perijinan pelaku usaha lokal yang mudah dan ramah pelaku usaha	Sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil sesuai SLA 14 hari kerja	N/A	Melaksanakan proses sertifikasi TKDN bagi Pelaku Usaha Industri Kecil lokal sesuai SLA 14 hari kerja	Laporan	Jumlah Laporan Monitoring Kepatuhan PD dalam mencatatkan e kontrak dalam SPSE dibandingkan jumlah paket transaksional	BPBJ
							Sertifikasi TKDN bagi Pelaku Usaha Industri Menengah sesuai SLA 45 hari kerja	N/A	Melaksanakan proses sertifikasi TKDN bagi Pelaku Usaha Industri Menengah lokal sesuai SLA 45 hari kerja	Sertifikat	Jumlah Sertifikasi Pelaku Usaha Industri Menengah yang tersertifikasi TKDN	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (DISDAGIN)
							2. Regulasi daerah yang tidak mendukung	N/A	Menerbitkan regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	Kegiatan	Jumlah regulasi daerah diterbitkan yang mendukung P3DN dan UMKM	SEKRETARIAT TIM P3DN
					3. Pelaku Usaha yang Belum Memahami terkait Proses Pengadaan secara Elektronik	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait Proses Pengadaan secara Elektronik	N/A	Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Koperasi, Pelaku Usaha dan UMKM lokal terkait Proses Pengadaan Secara Elektronik	Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha dan UMKM lokal terkait Proses Pengadaan Secara Elektronik	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung (DISKOPUKM), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung (DISKOMINFO) , DISDAGIN dan BPBJ	
					4. Pelaku Pengadaan belum mencantumkan TKDN dalam dokumen kontrak	Meningkatnya pencantuman TKDN dalam dokumen kontrak oleh Pelaku Pengadaan	N/A	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pencantuman TKDN dalam Kontrak dengan Pelaku Pengadaan	Pelaku Pengadaan	Jumah Pelaku yang mengikuti sosialisasi Kebijakan Pencantuman TKDN dalam Kontrak	BPBJ, DISDAGIN dan DISKOMINFO	

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
		Meningkatnya realisasi RUP PDN	% capaian RUP PDN	35%	1. Jumlah barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia	Meningkatnya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan	% barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi	N/A	Melaksanakan business matching antara DISDAGIN, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia)	Pelaku Pengadaan	Jumlah Pelaku Pengadaan yang mengikuti business matching	DISDAGIN dan DISKOMINFO
					2. Belum adanya kebijakan pemberian preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..	Paket	Persentase preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan	BPBJ
					3. Belum adanya informasi transaksi penggunaan e-katalog secara komprehensif				Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan e-katalog terkait harga (telah mencantumkan biaya tambahan seperti biaya kirim, biaya instalasi, dll) dan aktifitas penyedia (aktif atau tidak, bagaimana ratingnya, dll)	Laporan	Laporan hasil Monev e-katalog terkait transaksi penggunaan e-katalog secara komprehensif	BPBJ

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
					4. Belum optimalnya pelaksanaan penilaian penyedia oleh pengguna e-katalog				Melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian penyedia oleh penggunaan e-katalog	Laporan	Laporan monitoring dan evaluasi penilaian penyedia oleh pengguna di e-katalog	BPBJ
					5. Spesifikasi barang yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh penyedia dalam negeri	Menurunnya Belanja Produk Impor dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	% Belanja Produk Impor pada RUP terpenuhi	N/A	Menyusun Kebijakan Pengendalian Penggunaan Produk Impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Regulasi	Jumlah Kebijakan Pengendalian Penggunaan Produk Impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan	SEKRETARIAT TIM P3DN
									Melaksanakan Sosialisasi kebijakan Pengendalian penggunaan barang impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Pelaku Pengadaan	Jumlah Pelaku yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pengendalian penggunaan barang impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	SEKRETARIAT TIM P3DN
									Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Laporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	TIM MONEV P3DN
					6. Masih rendahnya kepatuhan melaksanakan RUP sesuai pencatatan	Meningkatnya Kepatuhan dalam Penggunaan PDN/UMKM	Persentase Tindaklanjut Kebijakan Penggunaan PDN/UMKM	N/A	Melaksanakan Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Paket Pekerjaan	Jumlah Paket Pekerjaan yang dilakukan Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	INSPEKTORAT

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Tar-get	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
									Melaksanakan tindaklanjuti pengawasan kepatuhan Penggunaan PDN/UMKM Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	hasil	Jumlah Paket Pekerjaan yang ditindaklanjuti rekomendasinya atas hasil Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	INSPEKTORAT

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002